

# Upaya Pengembangan Pendidikan *Entrepreneurship* Berbasis Pendidikan Karakter pada Kurikulum Madrasah

Mujianto Solichin<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Unipdu Jombang

Email: [mujianto.solichin@yahoo.com](mailto:mujianto.solichin@yahoo.com)

## Abstrak

Upaya pengembangan pendidikan *entrepreneurship* berbasis pendidikan karakter pada kurikulum Madrasah didasari oleh tiga hal; Pertama, menyiapkan peserta didik menjadi lulusan yang memiliki jiwa entrepreneur. Kedua, nilai-nilai *entrepreneurship* dipandang mampu membentuk karakter seseorang menjadi kuat dan mandiri. Ketiga, sebas apapun seseorang melakukan aktifitas mandiri, aktifitas tersebut harus tetap terkontrol sehingga hasilnya adalah kemanfaatan dan kemaslahatan, dan disinilah peran nilai-nilai Islami untuk mengisi dan mbingkainya. Ketiga dasar pemikiran ini nampaknya menemukan momentumnya pada KTSP yang memberikan ruang gerak luas bagi sekolah-sekolah Islami yang mampu memproduk gagasan pembaharuan sekaligus aksi konkrit bagi tercapainya kompetensi lulusan yang optimal. Konsep pengembangan kurikulum ini paling tidak membutuhkan persiapan pada dua hal; Pertama, desain muatan lokal jika *entrepreneurship* belum dianggap sebagai muatan nasional. Kedua, persiapan tenaga pendidik yang kompeten, dalam hal ini yang mampu mengintegrasikan antara pendidikan *entrepreneurship* dengan pendidikan karakter. Kesimpulannya, upaya pengembangan kurikulum seharusnya memang dilakukan dalam rangka optimalisasi kompetensi lulusan.

Kata kunci: **Kurikulum, *Entrepreneurship*, Karakter.**

## Abstract

*The Effort to Develop Entrepreneurship Education Combining with Character Learning in Madrasah Curriculum is based on three things: First, preparing alumnae to have entrepreneurship life. The second, entrepreneurship is able to build someone to be independent. The third, Islamic life can control the human behavior in everyday activity. Furthermore, it is hoped to give benefit, and useful for others. Those three reasons above are included in curriculum that give input to Islamic education institution. Therefore they can produce a better idea and real act for gaining competence alumnae. This curriculum development needs two things; first, local contain design. It is a must to do whenever entrepreneurship is in the national curriculum. The second is a competence educator. They are hoped to be able to combine between entrepreneurship education and Islamic life. From the above explanation it can be concluded that it is necessary to develop the curriculum to gain competence alumnae.*

Keyword: **Curriculum, *Entrepreneurship*, Character.**

## PENDAHULUAN

Pengaruh perubahan yang terjadi di sektor ekonomi, politik, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), kebijakan dan lain-lain telah mendorong terjadinya perubahan dan pergeseran paradigma kurikulum di Indonesia secara menyeluruh. Institusi pendidikan formal dinilai terlalu lamban mengikuti perubahan dan mengikuti dunia pembangunan dan industri. Di sisi lain pembenahan di segala lini terhadap pelaksanaan kurikulum belumlah tuntas. Tuntutan lulusan yang berkompotensi pun semakin menjadi beban berat para penyelenggara lembaga pendidikan. Lembaga/institusi pendidikan secara tidak langsung juga memiliki tanggung jawab berat, lembaga ini selain harus

mampu memfokuskan dirinya pada penguasaan pengetahuan, secara moral juga dituntut membantu melepaskan bangsa dan negara dari belitan tantangan globalisasi. Tentunya dengan usaha membenahan kurikulumnya dan upaya menciptakan lulusan-lulusan yang kompeten, relevan dan tanggap terhadap perkembangan dunia luar, dunia yang sarat dengan perkembangan IPTEK. (Team Depag Pusat: 2004).

Dalam mengantisipasi persaingan global perlu disiapkan lulusan peserta didik yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berkualitas serta sikap teladan (berkarakter) dalam rangka ikut berpartisipasi dalam persaingan dunia kerja. Walhasil, pengembangan pendidikan Entrepreneurship yang terintegrasi ke dalam kurikulum mata ajaran di madrasah menjadi sesuatu yang bersifat "*urgent*" untuk segera diwujudkan menjadi kurikulum nasional dalam rangka menciptakan kualitas sumber daya manusia (lulusan) unggul berjiwa wirausaha, meningkatkan semangat kewirausahaan pada setiap individu yang ada di masyarakat sekolah sebagai tulang punggung bangsa. Apalagi spirit dan motivasi untuk saling "berbagi dan memberi" itu sendiri lahir dari rahim Agama Islam, Rasulullah saw bersabda: "*Orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seseorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain*". HR. Tabhrani dan Daruquthni, diriwayatkan dari Jabir ra.

## PEMBAHASAN

### **Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa**

Prinsip yang digunakan dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah (1) berkelanjutan, (2) melalui semua mata pelajaran (saling menguatkan), muatan lokal, kepribadian, dan budaya madrasah, (3) nilai-nilai tidak diajarkan tapi dikembangkan, dan (4) dilaksanakan melalui proses belajar aktif. Pengembangan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa dilakukan dalam berbagai kegiatan belajar di kelas, madrasah, dan luar madrasah melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lain. Penerapannya dapat dilakukan dengan berbagai strategi pengintegrasian dalam program-program sekolah melalui kegiatan rutin, spontan, keteladanan, dan pengkondisian. Madrasah yang menjalankan program pengembangan budaya dan karakter bangsa ditandai dengan sejumlah indikator madrasah dan kelas. Pelaksanaan program pengembangan budaya dan karakter bangsa ini dinilai secara terus menerus dan berkesinambungan. Penilaian ini dilakukan oleh pihak eksternal (dinas pendidikan) dan internal (kepala madrasah dan guru). (Pusat Kurikulum Balitbang Kemendiknas, 2010). Adapun pengertian pendidikan karakter dalam grand desain pendidikan karakter adalah proses pembudayaan dan pemberdayaan nilai-nilai luhur dalam lingkungan satuan pendidikan (sekolah/madrasah), lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. (Koentjaraningrat: 2002). Nilai-nilai luhur ini berasal dari teori-teori pendidikan, psikologi pendidikan, nilai-nilai sosial budaya, ajaran agama, Pancasila, UUD 1945, dan UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta pengalaman terbaik dan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. (Kopertais Wilayah IV dan PKPM IAIN Sunan Ampel, 2012)

### **Madrasah: Lulusan yang Kompeten dan Tantangannya**

Madrasah sebagai salah satu institusi Islam secara tidak langsung juga memiliki tanggung jawab berat, lembaga ini selain harus mampu memfokuskan dirinya pada penguasaan pengetahuan agama, secara moral juga dituntut membantu melepaskan bangsa dan negara dari belitan tantangan globalisasi. Tentunya dengan usaha membenahan kurikulumnya dan upaya menciptakan lulusan-lulusan yang kompeten, relevan dan tanggap terhadap perkembangan dunia luar, dunia yang sarat dengan perkembangan IPTEK. Komposisi kurikulum yang ditawarkan madrasah setidaknya dapat menjawab fenomena tantangan tersebut di atas sesuai dengan harapan dunia kerja. Selain dituntut berbasis kompetensi, bahkan kurikulum institusi madrasah menurut (M. Baso: 2001) juga harus mempunyai karakteristik antara lain: 1) mempunyai visi, misi dan tujuan yang jelas dan terarah, 2) berwawasan bisnis dengan semangat kewirausahaan, 3) organisasi yang lebih mendarat, fleksibel, proaktif, adaptif dan melakukan pemberdayaan secara berkesinambungan, 4) berorientasi global dan domestik, 5) mempunyai jaringan kerja (*networking*) dan aliansi dengan *stakeholders* yang luas, baik domestik maupun global, 6) berbasis teknologi informasi dan memanfaatkannya secara

maksimal, 7) melakukan perbaikan terus menerus sehingga dapat menciptakan kreativitas dan inovasi baru, 8) berfokus pada kebutuhan para stakeholders, dan 9) *Customer-Driven* dengan fokus mutu terpadu.

Menurut British Council Indonesia dan Cliff Southcombe dinyatakan bahwa lembaga pendidikan madrasah dapat memerankan peran penting dalam menumbuhkan jiwa wirausaha bagi anak didiknya melalui kegiatan pengembangan wawasan hingga terjun langsung dalam praktek kegiatan usaha di madrasahnyanya maka kesempatan belajar (langsung) dapat diberikan bagi pemuda usia produktif agar memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan yang ditopang oleh sikap mental kreatif, inovatif, profesional, bertanggung jawab, serta berani menanggung resiko dalam mengelola potensi diri dan lingkungannya sebagai bekal untuk peningkatan kualitas hidupnya.

### **Otonomi Pendidikan dan Otonomi Daerah: Sebuah Jalan Terang Menuju Generasi Mandiri**

Pembelajaran kewirausahaan ini dapat menghasilkan perilaku wirausaha dan jiwa kepemimpinan, yang sangat terkait dengan cara mengelola usaha untuk membekali peserta didik agar dapat berusaha secara mandiri. Standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran Kewirausahaan berfungsi sebagai acuan pengembangan kurikulum. Mata pelajaran Kewirausahaan juga bertujuan agar peserta didik dapat mengaktualisasikan diri dalam perilaku wirausaha. Isi mata pelajaran Kewirausahaan difokuskan pada perilaku wirausaha sebagai fenomena empiris yang terjadi di lingkungan peserta didik. Berkaitan dengan hal tersebut, peserta didik dituntut lebih aktif untuk mempelajari peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi di lingkungannya.

Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, secara rasional dan akomodatif adalah melalui pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pihak madrasah. Artinya otonomi daerah dalam bidang pendidikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab para penyelenggara pendidikan di madrasah, merekalah yang memegang peranan tersebut. Pengembangan konsep otonomi pendidikan tingkat sekolah di Indonesia dilakukan melalui *School Based Manajemen (SBM)*.

Dalam dunia sekolah diperlukan perangkat kurikulum. Kurikulum merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan pendidikan pada suatu jenjang pendidikan sekolah. Sebagai suatu sistem, kurikulum memuat tujuan, isi/metode, dan evaluasi. Optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang pendidikan harus melibatkan unsur-unsur dalam komponen-komponen kurikulum, dikembangkan berdasar pada sekolah itu sendiri, tanpa mengesampingkan aspek daerah dan nasional.

Otonomi memberikan peluang bagi penerapan kurikulum yang berbasis pada kondisi, potensi, dan kebutuhan daerah, yang tentunya berbeda dengan propinsi lain di Indonesia. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum di era otonomi, adalah perkembangan siswa, perbedaan kemampuan siswa, perbedaan sosial budaya daerah, kebutuhan masyarakat, kebutuhan pembangunan nasional, dan perkembangan IPTEK.

Demikian pula dalam pembentukan kurikulum muatan lokal (kurlok), Kementerian Dinas Pendidikan Nasional daerah setempat bertanggung jawab terhadap pembentukan suatu badan pengembangan kurikulum daerah. Badan tersebut harus terdiri dari para guru pakar, pemerhati pendidikan dan pemuka masyarakat dibawah koordinasi Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, dalam penyusunan kurikulum muatan lokal di suatu lembaga pendidikan sekolah terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu relevansi kurikulum, artinya kurikulum muatan lokal hendaklah relevan dengan kebudayaan daerah, kebutuhan pembangunan daerah, kemampuan daerah yang meliputi kemampuan kognisi siswa, kemampuan tenaga pendidik, penyediaan teknologi, dan sarana pembelajaran, sehingga benar-benar bermanfaat dalam meningkatkan mutu pendidikan tertentu. Akuntabiliti kurikulum muatan lokal hendaknya dapat dipertanggung jawabkan secara akademik dan kepada masyarakat.

Muatan Lokal yang dipilih ditetapkan berdasarkan ciri khas, potensi dan keunggulan daerah, serta ketersediaan lahan, sarana prasarana, dan tenaga pendidik. Sasaran pembelajaran muatan lokal adalah pengembangan jiwa kewirausahaan dan penanaman nilai-nilai budaya sesuai dengan lingkungan. Nilai-nilai kewirausahaan yang dikembangkan antara lain inovasi, kreatif, berpikir kritis, eksplorasi, komunikasi, kemandirian, dan memiliki etos kerja. Nilai-nilai budaya yang dimaksud antara lain kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kepekaan terhadap lingkungan, dan kerja

sama. Penanaman nilai-nilai kewirausahaan dan budaya tersebut diintegrasikan di dalam proses pembelajaran yang dikondisikan supaya nilai-nilai tersebut dapat menjadi sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Muatan Lokal merupakan mata pelajaran, sehingga satuan pendidikan harus mengembangkan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) untuk setiap muatan lokal yang diselenggarakan. Contoh muatan lokal yang di dalamnya dikembangkan mata ajaran/bidang berbasis kewirausahaan seperti: Pendidikan Keterampilan Jasa, Agroindustri, dan Budidaya Tanaman. (Pusat Kurikulum Balitbang Kemendiknas. 2010).

### **Kewirausahaan Sosial Berbasis Sekolah: Contoh Kasus dan Sebuah Solusi**

Di Indonesia, praktek kewirausahaan sosial berbasis sekolah tidaklah baru. Bahkan sekolah-sekolah Islam swasta di Indonesia dijalankan sebagai perusahaan berbasis kewirausahaan sosial yang bertujuan untuk mengembangkan pendidikan. Implementasi prinsip-prinsip dan semangat kewirausahaan sosial sangat tampak pada berbagai sekolah Islam yang memiliki visi dan misi pendidikan, agama dan sosial. Contohnya: beberapa Kewirausahaan Sosial berbasis Sekolah Islam yang telah diidentifikasi oleh British Council adalah: 1) Pesantren Wirausaha Agrobisnis Abdurrahman bin Auf (Perwira AbA) terletak di Desa Wonosari, Klaten, Jawa Tengah. Perwira AbA dibentuk oleh Yayasan Amalul Musaki pada tahun 2000 dengan tujuan mendidik wirausahawan muda yang profesional, mandiri dan berakhlak Islami. 2). Koperasi Sekolah Produk Siswa Mandiri, SMP Muhammadiyah 12 Gresik, didirikan oleh para guru dan siswa SMP Muhammadiyah 12 Gresik dengan dukungan penuh dari pihak manajemen sekolah. Koperasi tersebut menjual makanan ringan dan produk-produk seni yang dibuat sendiri oleh para siswa. 3). Koperasi Sekolah Bina Amal, Semarang: Dirintis pada tahun 2006, Koperasi Sekolah Bina Amal menjual berbagai jenis kebutuhan sekolah, ATK, makanan ringan dan catering sekolah serta menyediakan layanan simpan-pinjam bagi karyawan sekolah.

## **KESIMPULAN**

Upaya pengembangan kurikulum seharusnya memang dilakukan dalam rangka optimalisasi kompetensi lulusan, termasuk kompetensi dalam bidang *entrepreneurship*. Madrasah sebagai satuan pendidikan mau tidak mau harus menjalankan misi pengembangan kurikulum ini. Pengembangan pendidikan *entrepreneurship* berbasis karakter memiliki tujuan agar peserta didik menjadi lulusan yang mau dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai karakter dalam kehidupannya sehari-hari, termasuk dalam dunia *entrepreneurship*.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendidikan *entrepreneurship* berbasis pendidikan karakter merupakan salah satu pengembangan kurikulum yang dimasukkan pada standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan, termasuk madrasah.
2. Pengembangan pendidikan *entrepreneurship* berbasis karakter dibingkai dalam kurikulum muatan lokal (mulok), dimana pelaksanaannya diserahkan kepada setiap madrasah untuk mengimplementasikannya sesuai dengan desain mulok yang dikehendaki seperti integrasi nilai-nilai *entrepreneurship* pada pembelajaran dengan mengembangkan SK dan KD mata pelajaran.
3. Praktik pendidikan *entrepreneurship* diimplementasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan bisnis di sekolah, misalnya pesantren wirausaha, koperasi sekolah, dan sebagainya.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Prof. Dr. drh. Hj. Endang Purwati, Ph.D, yang telah memberikan bimbingan dan apresiasi pada penulisan makalah ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Baso, M. Moerad, "Peluang dan Tantangan Perguruan Tinggi dalam Menyiapkan Angkatan Kerja Bagi Dunia Industri di Era OTODA dan Global", (Makalah Seminar, UNESA Surabaya, 2001).

British Council, *Buku Panduan Guru Kewirausahaan Sosial Berbasis Sekolah* (British Council Indonesia dan Cliff Southcombe).

Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 2002.

Kopertais Wilayah IV dan PKPM IAIN Sunan Ampel, *Pendidikan Karakter (Menjadi Berkarakter Muslim-Muslimah Indonesia)*, Surabaya: PT. Masmedia Buana Pustaka, 2012.

Pusat Kurikulum Balitbang Kemendiknas. 2010. *Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan; Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa*. Jakarta.

Team Depag Pusat, *Kurikulum 2004: Kerangka Dasar*, Jakarta: Depag Pusat, 2004.